



Strategi Pengembangan Potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari Berbasis Konsep Ekonomi Pancasila

Novia Putri Arini, Inayati Nuraini Dwiputri
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Indonesia
E-mail: noviaputriar@gmail.com

ABSTRACT

Development of Special Economic Zones can be interpreted as one of Indonesia's strategies that aim to encourage investment and increase competitiveness. The implementation of SEZ formation is determined by regional readiness in terms of capability and good management principles. Malang Regency Government has an effort to accelerate economic improvement by using the implementation of the development of the KEK Singhasari. By using a qualitative method, namely the case study approach, in the research identified the KEK Singhasari which is expected to facilitate technology and tourism development activities, increase employment opportunities, and investment using the Pancasila economic values approach. In order to realize and foster important economic values based on Pancasila, an analysis of the economic concept of Pancasila is needed in the context of an approach to the potentials of local wisdom in Malang Regency in order to create community welfare. Pancasila economy builds a mindset to be sensitive about humanitarian issues, as well as linkages with the nation and justice. This sensitivity forms the basis for analyzing roles between actors and synergizing between stakeholders and the community to support each other and work together. This collaboration was explored by researchers into a penta helix collaboration model.

Keywords: Pancasila Economy, Special Economic Zone, Penta Helix, Economic Potential

ABSTRAK

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat diartikan sebagai salah satu strategi Indonesia yang bertujuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing. Implementasi pembentukan KEK ditentukan oleh kesiapan daerah dari sisi kemampuan serta prinsip pengelolaan yang baik. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki upaya dalam mempercepat peningkatan perekonomian dengan menggunakan penerapan pengembangan KEK Singhasari. Dengan memakai metode kualitatif yaitu pendekatan studi kasus, dalam penelitian mengidentifikasi KEK Singhasari yang diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan pengembangan teknologi serta pariwisata, meningkatkan peluang kerja, dan investasi menggunakan pendekatan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Dalam rangka merealisasikan dan menumbuhkan nilai-nilai penting ekonomi yang berdasarkan Pancasila maka dibutuhkannya suatu analisis mengenai konsep ekonomi Pancasila dalam konteks pendekatan pada potensi-potensi kearifan lokal di Kabupaten Malang demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Pancasila membangun *mindset* untuk memiliki kepekaan mengenai masalah kemanusiaan, serta keterkaitan dengan bangsa dan keadilan. Kepekaan ini menjadikan dasar untuk menganalisis peran antar aktor serta menyinergikan antar *stakeholder* dengan masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama. Kolaborasi tersebut digali oleh peneliti ke dalam suatu model kolaborasi penta *helix*.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila, Kawasan Ekonomi Khusus, Penta Helix, Potensi Ekonomi



PENDAHULUAN

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kondusifitas iklim dalam berinvestasi di Indonesia. Berikut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dan berkaitan dengan kestabilan suatu politik, sosial maupun ekonomi seperti regulasi, hingga perpajakan. Perubahan iklim investasi di Indonesia diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi (Sihaloho & Muna, 2010). Kawasan Ekonomi Khusus memiliki suatu kedudukan yang sangat penting dalam upaya untuk peningkatan sebuah investasi di beberapa daerah. Sehingga dalam pembentukan KEK diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat perkembangan ekonomi di suatu wilayah dengan mengupayakan masuknya investasi dari penanam modal dan memutar kembali modal tersebut sebagai sumber dana operasional kegiatan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Berpedomankan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang berisi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain diberikannya berbagai fasilitas dan kemudahan kepada penanam modal dan pelaku usaha di KEK. Insentif tersebut terdiri dari keringanan atau suatu kemudahan dengan dibebaskan pajak, kepabeanan, dan juga pembiayaan cukai serta kemudahan di bidang pertanahan, perizinan, keimigrasian, dan penanaman modal. Pemberian insentif di bidang fiskal dan nonfiskal ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penanam modal, karena dengan berbagai kemudahan dan keringanan yang diberikan akan meningkatkan peluang ekonomi dan menjadi salah satu daya tarik KEK terhadap penanam modal.

Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya ditujukan untuk perkembangan suatu wilayah dan meningkatkan daya saing yang dapat dijadikan patokan perkembangan suatu daerah dan pemerataan wilayah-wilayah. Dalam melihat jalannya pembangunan serta kebijakan daerah tersebut, strategi yang digunakan dalam mengukur hasil cenderung memakai suatu indikator ekonomi tetapi tidak berdasarkan keberdayaan masyarakat (Asrom, 2007). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peran dari ekonomi Pancasila yang bertujuan dalam membuat suatu keadilan untuk masyarakat Indonesia, yang terbentuk dalam suatu rancangan masyarakat yang bersifat adil. Dalam penyelenggaraan proses pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan rencana yang dibangun dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pembangunan yang nantinya akan tercapai. Dengan demikian, proses ini akan menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat (Dwiputri, Kusufi, & Allo, 2019).

Permasalahan lain lahir dari implikasi pola kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah pusat acapkali melakukan suatu strategi pembangunan yang tidak memiliki sifat implementatif dan relatif tidak menanggapi dan mengembangkan suatu potensi budaya daerah yang telah ada. Dalam pelaksanaannya implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan daerah terdapat berbagai kendalanya. Dari beberapa permasalahan diatas terdapat juga permasalahan internal yakni pada pembuat kebijakan yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, tidak memiliki iktikad baik serta kecenderungan pembuat kebijakan terkontaminasi oleh paham neoliberalisme. (Asrom, 2007; Supriyanto, 2016). Sehingga diharapkan pada proses pembuat kebijakan perlu selaras dan berpedomankan pada nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan penjelasan tersebut Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan pengembangan teknologi, pariwisata dan meningkatkan peluang kerja serta peningkatan investasi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diupayakan optimal melalui penguatan antar *stakeholder* yang menyinergikan peran antar aktor yang saling mendukung dan bekerja sama yang sejalan



dengan pengamalan nilai Pancasila. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari Berbasis Konsep Ekonomi Pancasila”.

METODE PENELITIAN

Diperlukannya suatu metode untuk menunjang kelancaran penelitian, maka dari itu digunakannya metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang berpedoman pada filsafat *post positivism*, yang digunakan sebagai objek oleh peneliti dalam objek alamiahnya (Sugiyono, 2013). Penelitian yang dilaksanakan dalam sebuah penelitian bersifat kualitatif ini menggunakan model *Penta helix* yaitu mengetahui secara mendalam hubungan jejaring antar *stakeholder* antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media serta mengkaji pentingnya konsep ekonomi pancasila dengan mengintegrasikan kearifan lokal pada kebijakan pembangunan daerah. Teknik dalam pengambilan data didapatkan melalui wawancara dan kegiatan pengarsipan atau dapat disebut sebagai dokumentasi. Beragam sumber data yang diperlukan untuk merealisasikan penelitian ini memiliki beragam macam data yakni, data primer yaitu suatu data yang didapat secara langsung dari seorang pemberi data dan dikirim dari wartawan serta data sekunder yang memiliki strategi pengumpulam suatu data dengan melalui study literatur.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diartikan sebagai salah satu program nasional yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Malang terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). *Singhasari Integrated Tourism Complex (SITC)* dikembangkan sebagai suatu proyek terpadu dengan komponen usaha kawasan yaitu pengembangan usaha penunjang kegiatan pariwisata serta pertumbuhan dalam bidang teknologi yang ditujukan dalam aktivitas riset teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pertumbuhan suatu perangkat lunak dan jasa yang dipergunakan dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan informasi.

Tabel 1. Informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari

Luas lahan	120,3 hektar
Zona pengembangan Dampak ekonomi	Pariwisata dan pengembangan teknologi Diproyeksikan dapat mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030.
Regulasi	1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari Keputusan Presiden RI No.31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Timur
Kelembagaan yang telah dibentuk	1. Dewan Kawasan, 2. Administrator KEK, 3. Badan usaha pembangunan dan pengelolaan KEK (BUPP), 3. Tim percepatan operasional KEK Singhasari
Kewenangan	4. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah



	Kabupaten Malang kepada Administrator KEK Singhasari untuk menjalankan fungsi perijinan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati,
Dukungan infrastruktur wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tol Pandaan-malang 2. Jalan Raya Mondoroko (Jalur non tol utama menuju Surabaya) 3. Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas 011 Singosari – Karangploso. 4. Bandara Abdul Rahman Saleh 5. Stasiun Singosari

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), data diolah.

Dalam menetapkan suatu kawasan menjadi KEK, perlu diperhatikan apakah kawasan tersebut memiliki pasar potensial dan bagian dari wilayahnya terdapat sebuah sumber daya alam yang memiliki potensi dalam serta terdapat kelembagaan atau otoritas khusus yang berwenang penuh atas KEK. Penetapan lokasi KEK dengan pendekatan kriteria makro yaitu lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan lokasi lain, seperti industri pendukung manufaktur, lokasi yang ditentukan merupakan lokasi yang memiliki nilai strategis secara ekonomi, adanya dukungan yang kuat dari pemda setempat, status keunggulan lokasi, ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang, tersedianya sebuah lahan dalam membantu perkembangan perdagangan dan industri, terdapat lahan sekurang-kurangnya 10 ha, serta tersedianya lahan pendukung mengenai perluasan di kemudian hari (Dikun, 2003).

Tabel 2. Kesiapan Daerah Berdasarkan Persyaratan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

No.	Kriteria Pokok Penetapan Lokasi KEK Singhasari	Rincian Kriteria
1.	Adanya komitmen dari Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dukungan dari pemberj kepentingan (Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Pelaku usaha - PT Intelgensia Grahatama) • Mempunyai strategi rencana pengembangan serta pengelolaan kawasan • Penyediaan alokasi dana • Pelayanan terkait izin terpadu satu pintu (DPMPTSP KEK Singhasari)
2.	Lokasi sesuai dengan pengembangan wilayah dalam Rencana mengenai Tata Ruang Wilayah	Harmonisasi dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan RTR Kabupaten mengenai hal yang ditujukan untuk kawasan serta layak berdasarkan studi Amdal
3.	Memiliki posisi yang strategis	Mempunyai akses jalan yang memadai, berada di jalur utama Surabaya-Malang. Akses jalan tol Pandaan-Malang yang memiliki akses pintu tol Singosari
4.	Mempunyai potensi sumber daya unggulan	Lokasi kawasan memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi



5.	Mempunyai ketersediaan lahan	Memiliki luas wilayah pengembangan 120,3 Ha
6.	Memiliki batas kawasan yang jelas	Mempunyai master plan yang telah disahkan oleh Pemerintah

Sumber: Dokumen dan Laporan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari Bappeda, 2020

Potensi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Berdasarkan Dokumen Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Bappeda, 2020), KEK Singhasari mengintegrasikan 4 titik strategis potensi ekonomi dan pariwisata Kabupaten Malang antara lain:

1. Bandara Abdul Rachman Saleh, Kecamatan Pakis
2. KEK – SITC (Kawasan Ekonomi Khusus – Singosari Intgrated Tourism Complex) di Kecamatan Singosari, satu kawasan terpadu dengan UB Forest dan searah menuju ke Kota Batu.
3. Kawasan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
4. Kawasan Wisata Pantai Selatan Pantai Balekambang, Pantai Sendang Biru, Pantai 3 Warna dan pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan (Pansela).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019, Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari ialah suatu bentuk usaha dari pemerintah pusat dalam merealisasikan dengan cepat mengenai pembangunan perekonomian Kabupaten Malang. Wilayah Singosari di Kabupaten Malang mempunyai suatu daya tarik yang berkaitan dengan potensi dan keunggulan antara lain keunggulan geoekonomi, yang memiliki fokus pada lokasi titik wilayah Singosari. Adanya sebuah keterkaitan dengan ruas tol Pandaan-Malang dalam upaya untuk mempermudah akses dan pergerakan para wisatawan maupun warga serta lokasi wilayah Singosari yang berdekatan dengan Kota Batu maupun Kota Malang. Dibalik itu, wilayah Singosari yang memiliki keunggulan geostrategis bidang pariwisata yang memiliki tema yakni, *cultural, heritage, and historical tourism*.

Populasi wilayah yang terletak di Malang Raya mempunyai potensi indeks pembangunan manusia (IPM) dengan nilai rata-rata diatas Provinsi Jawa Timur. Hal itu, dapat dijadikan sebagai modal untuk mengelola kembali sumber daya manusia agar perkembangannya semakin maju karena sumber daya manusia memiliki potensi baik untuk dimanfaatkan, khususnya pada perkembangan ekosistem digital dan ekonomi kreatif. Berdasarkan IPM Kabupaten Malang pada 2019 berada pada angka 70,35 (BPS, 2019), Kota Batu 75,88 (BPS, 2019) dan Kota Malang mencapai 81,32 (BPS, 2019) dengan rata-rata IPM Jawa Timur pada tahun 2019 adalah 71,50.

Analisis Penta Helix dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

1. Identifikasi Peran Aktor dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diharapkan dapat optimal melalui sebuah kerjasama antar *stakeholder*. Kerjasama tersebut digali lebih *detail* oleh peneliti berdasarkan pada model *penta helix*. Model *penta helix* menyinergikan peran antara akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media

Tabel 3. Peran Antar Aktor dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Aktor	Peran
Dewan Nasional 1. Ketua: Menko Perekonomian	• Merancang suatu rencana induk nasional Kawasan Ekonomi khusus



<p>2. Anggota: Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU & Perumahan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Bappenas, Kepala BKPM [17]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kajian khusus mengenai asal usul suatu wilayah agar dijadikan KEK • Memecahkan suatu permasalahan strategis dalam pelaksanaan serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus <p>(Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019)</p>
--	--

Dewan Kawasan

Ketua : Gubernur Jawa Timur

Wakil Ketua : Bupati Malang

Anggota :

1. Sekda Provinsi Jawa Timur
2. Kakanwil Ditjen Pajak Jatim
3. Kakanwil Ditjen Bea dan cukai Jatim II
4. Kakanwil Kemenkumham
5. Asisten perekonomian dan pembangunan setda provinsi jatim
6. Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa timur
7. Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang
8. Kepala badan pendapatan daerah kabupaten malang
9. Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang

- Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh dewan nasional agar dapat mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya
 - Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun
- (Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019)

Administrator KEK:

DPMP/TSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) KEK Singhasari

- Melakukan pemberian izin usaha yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, mengembangkan usaha di KEK Singhasari.
- Melaksanakan sebuah pengawasan dan pengendalian operasional KEK

Badan Usaha :

1. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero),
2. PT Intelegensia Grahatama dan
3. PT Cakrawala Mandala Nusantara.

Penyedia dan pengelola infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, jaringan limbah, dan energi.

Pelaku Usaha :

Melakukan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Pengembangan *Integrated Digital Ecosystem* dan *Cloud Innovation Center* oleh Telkom Group)

Akademisi :

- Melakukan kerjasama pengembangan wilayah
- Transfer informasi dan teknologi serta keterlibatan perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat untuk pengembangan Kawasan Ekonomi



	Khusus
Komunitas :	Komunitas sebagai perantara atau penghubung antar pemangku kepentingan serta sebagai pencipta nilai-nilai kreatif karena komunitas terdiri atas individu-individu yang didalamnya mempunyai minat sama dan selaras dengan bisnis atau kegiatan yang sedang tumbuh (Pengembangan KEK Singhasari bersama Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Start Up)
Media :	Dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari peran media melalui website resmi KEK Singhasari serta media massa (televisi atau surat kabar) yang turut terlibat dalam menyalurkan informasi terkait Pengembangan KEK Singhasari

Sumber: Data primer dan sekunder setelah diolah, 2020

2. Identifikasi hubungan jejaring antar aktor di Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Kolaborasi yang dilaksanakan antara kelima aktor *penta helix* dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari terwujudkan melalui berbagai macam peran diantara lima *stakeholder* agar terciptanya suatu dukungan maupun sikap kerjasama yang tumbuh. Peran akademisi di sini merupakan suatu konsep dimana dapat memberikan arahan pada suatu perkembangan sumber daya manusia. Akademisi memiliki kedudukan peran untuk menyiapkan standarisasi yang berasal dari proses usaha serta potensi yang dimiliki berbagai bidang untuk tujuannya pengembangan sumber daya manusia. Draghici, Baban, Gogan, & Ivascu (2014:24) menyebutkan bahwa kedudukan peran akademisi bisa dibagi konsepnya menjadi tiga peran yaitu pendidikan yang sumber dayanya berasal dari intelektualitas. Penelitian sebagai penyebarluasan ilmu untuk pengetahuan hal-hal yang baru. Serta pengabdian masyarakat melingkupi kewirausahaan, pengetahuan, serta para ahli dan teknologi. Bisnis yang terdiri pihak swasta ikut berperan dan memiliki kedudukan dalam penyediaan infrastruktur. Bisnis mendominasi kendali menjadi sebuah nilai ekonomi. Keberadaan komunitasnya berperan dalam akselerasi *skill* pengembangan bisnis. Komunitas sendiri memiliki sebuah peran dalam berkontribusi untuk memberikan akses untuk dunia usaha dan mendorong para individu yang memiliki kreativitas untuk bermain peran penting agar bertahan dalam industri bisnis.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan peran pemerintah sebagai penentu arah serta sebagai regulator dalam pengembangan kawasan. Menurut Dwiputri, Pradipto, & Arsyad (2019) tata kelola pemerintah yang lemah dapat memperburuk perekonomian, penting untuk memastikan supremasi hukum, meningkatkan efisiensi dan kualitas regulasi. Pemerintah dalam hal ini Dewan Nasional, Dewan Kawasan serta Administrator memiliki kedudukan dan peran sebagai regulator kebijakan yang dimana mengatur seluruh pihak agar dapat berkomunikasi maupun berjejaring dan bekerjasama. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator akses modal serta pelatihan kreatif.

Peran media massa sebagai media partner dan publikasi dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Media memiliki kecerdasan dalam bermain peran yaitu menghubungkan aktor utama dengan suatu pasar industri baik dalam skala nasional maupun Global. Karena media merupakan suatu alat dalam mempromosikan informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat begitu pula sebaliknya.



Pada kolaborasi *penta helix* dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diperoleh aktor yang lebih dominan dibandingkan dengan aktor lainnya. Aktor yang disebut yaitu Pemerintah dalam hal ini mencakup Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator serta badan usaha yang merupakan aktor kunci yang berperan sebagai regulator, manajemen penyelenggara. Serta administrator dan badan usaha yang berperan sebagai fasilitator dan evaluator dalam pengelolaan KEK Singhasari.

Kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha, akademisi, serta komunitas dalam konsep *penta helix* merupakan *collaborating* yakni adanya saling berbagi sumber daya, risiko, dan tanggung jawab (Roberts, 2004)) Pemerintah dan bisnis menjalin hubungan dengan kolaborasi karena perlu adanya saling berbagi sumber daya, risiko, dan tanggung jawab. Bisnis dapat membantu dalam memberikan bantuan modal, fasilitas dan akses di dalam kawasan. Pemerintah dalam hal ini bekerjasama dengan komunitas yang bertujuan agar pengembangan kawasan tersebut tercipta nilai-nilai kreatif dari sebuah komunitas. Tetapi untuk peran pemerintah dan media adalah sebagai *coordinating*. Jenis hubungan koordinasi cukup untuk hubungan yang terjalin antara pemerintah dan media dengan salah satu peran media adalah publikasi dengan memberikan informasi tentang Kawasan Ekonomi Khusus kepada masyarakat.

Peran Akademisi dengan media dan bisnis adalah *networking*. *Networking* ialah sebuah jenis kerjasama yang informal dalam teori Roberts (2004) yang berjudul *Matrix of Strategies for Working Together*. Hal yang ditunjukkan dalam hubungan ini yakni suatu pertukaran informasi yang diberikan kepada penerima informasi yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong program agar perkembangannya dapat berjalan secara optimal dengan peran yang di digunakan. Konsep hubungan antara komunitas dengan media dapat dijuluki sebagai *networking*. Keterkaitan komunitas dengan media tidak memerlukan suatu hubungan yang resmi agar dapat saling bertukar informasi karena ciri dari hubungan ini ialah tidak terdapatnya suatu sumber daya dan Fokus utama dari hubungan ini merupakan hanyalah sebatas pertukaran informasi saja (Roberts, 2004).

Pertukaran informasi sangat penting dalam pengembangan program agar dapat berjalan dengan optimal. Media manapun perlu hadirnya sebuah informasi karena merupakan suatu komponen yang diperlukan oleh media sebagai bahan publikasi. Sedangkan komunitas perlu suatu informasi dalam meningkatkan maupun memperbaiki atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Kunci utama kesuksesan inovasi model penta helix ialah adanya sinergi serta komitmen antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan perannya, sehingga model *penta helix* sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor (Slamet et al., 2017).

Penanaman Nilai-Nilai Pancasila

Dalam mewujudkan suatu perkembangan daerah, terdapat suatu komponen yang dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan yaitu Pancasila. Situasi tersebut bercermin dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pengelolaan tata kehidupan yang berdasarkan sila satu dengan sila lainnya yang dipercaya saling memiliki keterkaitan. Nilai-nilai Pancasila yang lahir merupakan suatu sumber inspirasi bernegara yang di mana perlu menjiwai suatu sikap kehidupan masyarakat. Pemberian makna yang sempit untuk Pancasila dapat menyebabkan terbatasnya suatu kehidupan berbangsa yang memiliki aspek yang sangat luas. Hal berikut merupakan suatu hal yang penting dilakukan karena merupakan penanaman dari nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan jiwa yang mencintai tanah air dalam kehidupan manusia (Asrom, 2007). Apabila runtuhnya etika pancasila sebagai landasan moral manusia yang dijiwai semangat nasionalisme dan kerakyatan akan berdampak pada hilangnya sosial bagi seluruh rakyat.



Keterkaitan Pancasila dengan pengembangan daerah yang mempertimbangkan potensi lokal diatur jelas pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana kekayaan alam yang ada di muka bumi merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Semangat solidaritas sosial yang bertujuan untuk pemerataan serta adanya sifat tenggang rasa menjadi manifestasi dari sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu pada sila kelima, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga memiliki hak terhadap pemanfaatan kekayaan alam untuk pembangunan.

Suatu pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu alasan yang berkaitan dengan pengabaian budaya ataupun kearifan lokal karena kemampuan yang dimiliki oleh alam perlu selaras dengan pembangunannya. Karenanya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Singhasari memanfaatkan keunggulan geostrategisnya yakni wilayah Singosari memiliki sektor pariwisata dengan tema *cultural, heritage, and historical tourism*. Serta pemanfaatan kemampuan dan daya tarik yang dimiliki oleh wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) dapat dioptimalkan bagi pengembangan KEK Singhasari.

Pengembangan Daerah dalam Konsep Ekonomi Pancasila di KEK Singhasari.

Pembangunan suatu daerah merupakan komponen dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan suatu kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga terciptanya suatu kemampuan yang profesional dalam memberikan layanan untuk masyarakat. Pembangunan Daerah dapat diperlihatkan sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik sekaligus diperlihatkan untuk upaya dalam memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat dalam peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Dalam tiga dekade terakhir pembangunan memberikan banyak kemajuan tetapi juga masalah besar, masalah tersebut antara lain perekonomian Indonesia masih rentan terhadap kekuatan eksternal, serta kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merata yakni kemajuan pembangunan tidak memberikan dampak yang ditimbulkan untuk peningkatan sumber daya manusia serta ekonomi di daerah tersebut (Mubyarto, 2002).

Langkah strategis pembangunan yang dikembangkan harus diseimbangkan antara program investasi dan program pembangunan ekonomi yang berbasis budaya dan potensi-potensi yang ada. Potensi penting dijadikan pertimbangan dalam pembangunan daerah, karena setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing. Memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran di berbagai bidang, salah satunya yakni dibidang ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi baik di lingkungan rumah tangga, maupun bermasyarakat setiap warga negara harus menerapkan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

Perlunya diwujudkan suatu paradigma pembangunan dimana memiliki dasar kerakyatan serta perlindungan untuk masyarakat. Bagaimana pengelolaan anggaran yang lebih pro ke rakyat, cepat tanggap dan partisipatif. Perilaku birokrasi aparatur yang memiliki orientasi kerja yang memuaskan keinginan pribadi (konsumtif) sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi (Asrom, 2007). Hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor penghambat pembangunan daerah.

Pada pengembangan daerah, masyarakat perlu dijadikannya sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Pemerintah perlu memberikan ruang yang cukup luas untuk warga negara dalam mengelola pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam pengembangan KEK Singhasari diharapkan dapat optimal melalui penguatan kolaborasi antar *stakeholder* baik antara akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, media maupun masyarakat.



Keterkaitan antar aktor maupun masyarakat pada pembentukan KEK Singhasari merupakan salah satu implementasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan karena diperlukan peran partisipasi aktif dari masyarakat bagi industri kreatif di KEK Singhasari.

Pengembangan KEK juga diperlukan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK, hal tersebut diatur jelas pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut keterkaitan ekonomi pancasila pada pengembangan KEK yakni tidak melupakan peran pelaku usaha kecil masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan KEK demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu bagi pembangunan daerah, potensi yang dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik maka akan dapat terbentuk sistem pengetahuan kolektif masyarakat agar hidup berdasarkan nilai-nilai yang membawa keberlangsungan hidup yang memiliki sifat rukun saling asah asih, Hal berikut dapat membangun sebuah kekuatan untuk pembangunan suatu daerah. Maka apabila direalisasikan suatu pemanfaatan daya tarik yang dilakukan dengan maksimal untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi yang dimiliki Kabupaten Malang bagi pengembangan KEK Singhasari diharapkan dapat berdampak baik bagi banyak pihak antara lain dalam peningkatan investasi untuk Kabupaten Malang, peningkatan bagi sektor pariwisata, dll.

KESIMPULAN

Kolaborasi antara kelima aktor dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari terwujudkan melalui peran diantara lima *stakeholder* yang saling memberikan suatu dukungan serta kerja sama karena kunci utama kesuksesan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dengan adanya sinergi serta komitmen antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Strategi dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki Malang Raya tersebut diharapkan dapat menghadirkan suatu perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang di mana nantinya dapat berkontribusi untuk perekonomian nasional.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dalam upaya pemanfaatan KEK Singhasari sebagai motor penggerak sektor pariwisata di wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya perlu dukungan suatu sinergi dari 3 kepala daerah yang di mana perlu mempunyai komitmen satu sama lain dalam memajukan kawasan dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun buatan yang memiliki daya tarik untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Pancasila sebagai landasan ideologi negara, mewujudkan suatu inovasi yang menciptakan suatu gagasan dalam proses untuk menentukan pembangunan negara Indonesia. Namun seringkali internalisasi yang hadir dari nilai Pancasila pada suatu kebijakan masih lemah karena adanya suatu pembangunan daerah yang lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi tanpa melihat adanya pemerataan serta pemberdayaan bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asrom, H. (2007). Pancasila, Kearifan Lokal dan Pengembangan Daerah. *Jurnal Filsafat*, 17(2), 204–218.
- Bappeda. (2020). *Dokumen dan Laporan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari*. Kabupaten Malang.
- BPS. (2019a). *Kabupaten Malang dalam Angka 2019*. Kabupaten Malang.



- BPS. (2019b). *Kota Batu dalam Angka 2019*. Kota Batu.
- BPS. (2019c). *Kota Malang dalam Angka 2019*. Kota Malang.
- Dikun, S. (2003). *Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama dan Pasca Krisis*. Jakarta: Kementerian Negara PPN/BAPPENAS.
- Draghici, A., Baban, C.-F., Gogan, M.-L., & Ivascu, L.-V. (2014). A Knowledge Management Approach for The University-industry Collaboration in Open Innovation. *Procedia Economics and Finance*, 22–23. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00377-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00377-9)
- Dwiputri, I. N., Kusufi, M. S., & Allo, A. G. (2019). Projections of Regional Macroeconomic Conditions using the Univariate Forecasting Method. *Economics Development Analysis Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.30188>
- Dwiputri, I. N., Pradipto, R., & Arsyad, L. (2019). Corruption and capital growth: Identification of bribery by the firm. *International Journal of Economics and Management*, 13(2).
- Mubyarto. (2002). Peran Ilmu Ekonomi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(3), 233–242.
- Roberts, J. M. (2004). *Alliances, Coalitions and Partnerships: Building Collaborative Organization*. New York: New Society Publishers.
- Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Litbang Perdagangan*, 4(1).
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN UKM DIGITAL DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2). <https://doi.org/10.25124/jmi.v16i2.319>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2016). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Politika*, 4(1), 80–88.